



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3887-3897

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Realisasi Anggaran Program Bantuan Sosial Pangan, Kualitas Demokrasi dan IPM Dalam Mendorong Pertumbuhan PDRB Per Kapita: Studi Kasus 10 Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2018-2024

Muhammad Abdi¹, Fahmi Aprianyah Siregar², Dwi Anggriani³, Wandira Anzani⁴, Shabilla Aisyah⁵, Runggu Sihombing⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

¹mabdi7346@gmail.com, ²fahmiaprianyah.7233240022@mhs.unimed.ac.id, ³dwianggriani001@gmail.com,
⁴ndiraa445@gmail.com, ⁵shabillaaisyah15@gmail.com, ⁶runggusihombing2020@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh realisasi anggaran bantuan sosial pangan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2018 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan regresi data panel, melalui tiga tahap uji spesifikasi Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier yang menghasilkan model terbaik berupa Random Effect Model (REM). Data penelitian diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan perangkat lunak E-Views 10. Hasil analisis mengungkapkan bahwa realisasi anggaran bantuan sosial pangan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, menegaskan peran belanja sosial sebagai stimulus fiskal yang dapat meningkatkan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, IDI berpengaruh negatif dan signifikan, menandakan bahwa meskipun kualitas demokrasi meningkat, belum sepenuhnya diiringi dengan tata kelola yang efektif sehingga berpotensi menimbulkan gesekan institusional yang memperlambat perkembangan ekonomi daerah. Sementara itu, IPM menjadi variabel paling dominan dan berpengaruh positif signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Ketiga variabel tersebut secara bersamaan mampu menjelaskan 91,9% variasi pertumbuhan PDRB per kapita di wilayah tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi kebijakan sosial, penguatan tata kelola demokrasi, dan pembangunan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Bantuan Sosial Pangan, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita menjadi ukuran penting karena mencerminkan kemampuan ekonomi wilayah dalam menciptakan nilai tambah dan pendapatan bagi penduduknya. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan kompleks terkait pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Sumatera yang masih menunjukkan disparitas PDRB per kapita antarprovinsi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,03%, sementara beberapa provinsi di Sumatera seperti Aceh, Bengkulu, dan Riau berada di bawah rerata nasional, menandakan ketidakmerataan kinerja ekonomi regional yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah.



Gambar 1. Perkembangan PDRB Per Kapita Pulau Sumatera

Ketimpangan kinerja ekonomi tersebut semakin terlihat ketika meninjau perkembangan PDRB per kapita pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2024. Grafik memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan peningkatan nilai PDRB per kapita di beberapa provinsi, pola pertumbuhannya menunjukkan dinamika yang tidak merata antarwilayah. Lonjakan tajam di provinsi seperti Riau dan Kepulauan Riau mengindikasikan struktur ekonomi yang lebih kuat dan ketergantungan pada sektor berkapasitas tinggi, sementara fluktuasi serta penurunan pada tahun-tahun tertentu mencerminkan sensitivitas daerah lain terhadap guncangan eksternal, termasuk dampak pandemi. Variasi antarprovinsi yang cukup mencolok ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera tidak berjalan secara serempak, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menentukan perbedaan kinerja PDRB per kapita tersebut.

Sejak tahun 2018, pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan sosial melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kini menjadi bagian dari Program Bantuan Sosial Pangan. Program ini dirancang untuk mengatasi kerentanan pangan serta meningkatkan daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hermawan (2021) menunjukkan bahwa distribusi bantuan pangan mampu memengaruhi pola pendapatan rumah tangga sehingga mendorong pemerataan ekonomi, sementara penelitian Nasution dan Satria (2025) menegaskan bahwa program bantuan sosial efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah pedesaan. Selain itu, Amin et al. (2024) menjelaskan bahwa belanja bantuan sosial tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga memicu aktivitas ekonomi lokal dan memperkuat permintaan agregat. Dengan demikian, bantuan sosial pangan berpotensi memberikan dorongan ekonomi yang lebih luas dan secara tidak langsung turut meningkatkan output daerah, sehingga menjadi faktor yang relevan dalam memengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita.

Selain aspek kebijakan sosial, dimensi demokrasi juga menjadi faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana proses politik, hak-hak sipil, dan kebebasan publik berjalan dengan baik. Purba dan Hariyadi (2023) menekankan bahwa aspek kelembagaan demokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena demokrasi yang sehat dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kebijakan ekonomi. Selanjutnya Maryani dan Furqon (2022) menemukan bahwa variabel-variabel demokrasi seperti

kebebasan sipil dan hak politik berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2020–2022. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas demokrasi dapat memperkuat iklim investasi, mengurangi risiko politik, dan meningkatkan efektivitas birokrasi, yang semuanya berdampak positif bagi peningkatan PDRB per kapita.

Disisi lain, pembangunan manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan determinan utama pertumbuhan ekonomi. IPM mencakup indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang secara langsung memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Saragih dan Azansyah (2023) menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Indonesia berkontribusi terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan kerja masyarakat. Temuan tersebut konsisten dengan Mukaromah et al. (2023) menemukan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu Endang (2024) menunjukkan bahwa komponen-komponen IPM memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi daerah yang tercermin melalui peningkatan PDRB per kapita.

Terlepas dari pentingnya peran bantuan sosial, kualitas demokrasi dan IPM dalam mendorong kinerja ekonomi daerah, penelitian terdahulu masih banyak membahas ketiganya secara terpisah. Kajian mengenai bantuan sosial pangan biasanya berfokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga, sementara studi terkait IDI dan IPM cenderung meninjau keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara makro tanpa melihat interaksi antarfaktor. Pemisahan fokus tersebut menyebabkan gambaran mengenai hubungan simultan ketiga variabel ini terhadap pertumbuhan PDRB per kapita belum sepenuhnya terungkap. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang perlu diisi melalui analisis yang mengintegrasikan realisasi anggaran bantuan sosial pangan, IDI, dan IPM dalam menjelaskan variasi pertumbuhan PDRB per kapita di Pulau Sumatera.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat dinamika ekonomi regional di Pulau Sumatera yang masih menunjukkan ketimpangan antar provinsi dan belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh temuan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh masing-masing variabel secara simultan serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan PDRB per kapita di 10 provinsi Pulau Sumatera pada periode 2018–2024. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru mengenai keberlanjutan kebijakan sosial dan tata kelola demokrasi dalam mendorong pembangunan ekonomi regional, khususnya di wilayah Sumatera.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh realisasi anggaran bantuan sosial pangan, Indeks Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB Per Kapita pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2024. Data yang digunakan merupakan data panel yang menggabungkan antara data cross section dan time series. Menurut Gujarati & Porter (2012), penggunaan data panel mampu memberikan estimasi yang lebih representatif karena dapat menangkap variasi antarwilayah dan antarperiode secara simultan. Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada sepuluh provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

Analisis data dilakukan menggunakan *Software E-Views 10*. Data diolah dimulai dengan uji spesifikasi model yaitu proses penentuan model terbaik yang dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah model terpilih dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan Uji t, Uji F, dan nilai Adjusted R² untuk mengidentifikasi pengaruh parsial, simultan, serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi PDRB per kapita pada wilayah penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan tiga pilihan model estimasi, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model yang paling tepat, dilakukan serangkaian uji spesifikasi, meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, guna memastikan kesesuaian model yang digunakan. Adapun hasil pengujian tersebut disajikan sebagai berikut:

A. Uji Spesifikasi Model

Tabel 1. Hasil Uji Spesifikasi Model

Jenis Uji	Angka Statistik	Prob.	Model Terpilih
Chow	314.336810	0.0000	FEM
Hausman	0.913668	0.8221	REM
Lagrange Multiplier	13.24823	0.0000	REM

Berdasarkan tabel 1, diperoleh nilai probability untuk uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier sebesar 0.0000 < 0.05 dengan perolehan model FEM, 0.8221 > 0.05 dengan perolehan model REM dan 0.0000 dengan perolehan model REM. Dengan demikian, dari tiga rangkaian pengujian yang dilakukan, model yang paling layak digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect model (REM).

B. Analisis Regresi Model Terpilih (REM)

1. Interpretasi Model Terpilih (REM)

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda Model REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.368579	0.432090	3.167349	0.0023
LOG(Realisasi Anggaran)	0.027506	0.006662	4.128719	0.0001
IDI	-0.003167	0.001487	-2.129699	0.0369
IPM	0.129338	0.006920	18.69032	0.0000
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.414396	0.9915
Idiosyncratic random			0.038444	0.0085
Weighted Statistics				
R-squared	0.923313	Mean dependent var		0.386452
Adjusted R-squared	0.919828	S.D. dependent var		0.133612
S.E. of regression	0.037832	Sum squared resid		0.094462
F-statistic	264.8819	Durbin-Watson stat		1.489983
Prob(F-statistic)	0.000000			

Unweighted Statistics			
R-squared	0.415508	Mean dependent var	11.02796
Sum squared resid	8.395766	Durbin-Watson stat	0.016764

Berdasarkan hasil output di atas, dapat dibentuk persamaan model analisis sebagai berikut:

$$\text{Log}(Y)_{it} = C + \beta_1 \text{Log}(X1)_{it} - \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + e_{it}$$

$$\text{Log}(Y)_{it} = 1.368579 + 0.027506 \text{Log}(X1)_{it} - 0.003167 X2_{it} + 0.129338 \beta_3 X3_{it} + e_{it}$$

- Nilai Konstanta sebesar 1.368579 mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen dianggap tetap, maka jumlah PDRB Per kapita bernilai 1.368579 ribu rupiah.
- Nilai koefisien pada variabel realisasi anggaran bantuan sosial pangan bernilai positif sebesar 0.027506. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif diantara keduanya, sehingga menjelaskan jika realisasi anggaran bantuan sosial pangan mengalami peningkatan maka PDRB Per Kapita juga akan meningkat sebesar 0.027506 ribu rupiah.
- Nilai koefisien pada variabel indeks demokrasi (IDI) bernilai negatif sebesar -0.003167. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan negatif diantara keduanya, sehingga menjelaskan jika indeks demokrasi mengalami peningkatan maka PDRB Per Kapita akan mengalami penurunan sebesar 0.003167 ribu rupiah.
- Nilai koefisien pada variabel IPM bernilai positif sebesar 0.129338. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif diantara keduanya, sehingga menjelaskan jika IPM mengalami peningkatan maka PDRB Per Kapita juga akan meningkat sebesar 0.129338 ribu rupiah.

2. Interpretasi Cross Section Model Terpilih (REM)

Untuk memahami perbedaan karakteristik antar-provinsi dalam model yang diestimasi, disajikan nilai *cross-section effect* yang menunjukkan besarnya deviasi masing-masing provinsi dari intercept umum pada Random Effect Model (REM) dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Hasil Cross Section Effect REM

No	Provinsi	Effect
1.	Aceh	-0.576378
2.	Sumatera Utara	-0.067049
3.	Sumatera Barat	-0.332163
4.	Riau	0.642673
5.	Kepulauan Riau	0.344859
6.	Jambi	0.173837
7.	Sumatera Selatan	0.204438
8.	Kep. Bangka Belitung	0.058190

9.	Bengkulu	-0.345682
10.	Lampung	-0.102725

Berdasarkan hasil output pada tabel 3, diperoleh nilai koefisien pada 10 provinsi di pulau Sumatera, sebagai berikut:

a. PDRB Per Kapita Provinsi Aceh

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Aceh sebesar -0.576378. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar -0.576378, maka nilai koefisien PDRB per kapita Aceh berada pada angka 0.792201 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

b. PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Utara

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Sumatera Utara sebesar -0.067049. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar -0.067049, maka nilai koefisien PDRB per kapita Sumatera Utara berada pada angka 1.301530 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

c. PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Sumatera Barat sebesar -0.332163. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar -0.332163, maka nilai koefisien PDRB per kapita Sumatera Barat berada pada angka 1.036416 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

d. PDRB Per Kapita Provinsi Riau

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Riau sebesar 0.642673. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar 0.642673, maka nilai koefisien PDRB per kapita Riau berada pada angka 2.011252 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

e. PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Kepulauan Riau sebesar 0.344859. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar 0.344859, maka nilai koefisien PDRB per kapita Kepulauan Riau berada pada angka 1.713438 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

f. PDRB Per Kapita Provinsi Jambi

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Jambi sebesar 0.173837. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar 0.173837, maka nilai koefisien PDRB per kapita Jambi berada pada angka 1.542416 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

g. PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Selatan

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Sumatera Selatan sebesar 0.204438. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar 0.204438, maka nilai koefisien PDRB per kapita Sumatera Selatan berada pada angka 1.573017 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

h. PDRB Per Kapita Provinsi Kep. Bangka Belitung

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 0.058190. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar 0.058190, maka nilai koefisien PDRB per kapita Kep. Bangka Belitung berada pada angka 1.426769 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

i. PDRB Per Kapita Provinsi Bengkulu

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Bengkulu sebesar -0.345682. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar -0.345682, maka nilai koefisien

PDRB per kapita Bengkulu berada pada angka 1.022897 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

j. PDRB Per Kapita Provinsi Lampung

Diperoleh hasil Cross-Section Effect untuk provinsi Lampung sebesar -0.102725. Ketika nilai konstanta model sebesar 1.368579 dikombinasikan dengan efek provinsi sebesar -0.102725, maka nilai koefisien PDRB per kapita Lampung berada pada angka 1.265854 dengan asumsi variabel independen berada dalam kondisi tetap.

C. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis berguna untuk menjelaskan kemampuan variabel independen model dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini juga menunjukkan bagaimana kontribusi variabel independen baik secara simultan maupun parsial terhadap perubahan pada variabel dependen. Adapun uji yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil output pada tabel 2, diperoleh nilai Adjusted R-squared senilai 0.919828. Hal ini mengindikasikan ragam nilai PDRB Per Kapita dapat diterangkan oleh perubahan variabel realisasi anggaran bantuan sosial pangan, indeks demokrasi dan IPM sebesar 91.9%. Sedangkan 8.1% sisanya dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

2. Uji F (Pengujian Simultan)

Berdasarkan hasil output pada tabel 2, diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ senilai $264.8819 > 2.74$ dengan nilai prob $0.0000 < 0.05$. Hal ini mengindikasikan variabel independen yaitu realisasi anggaran bantuan sosial pangan, indeks demokrasi dan IPM secara simultan mempengaruhi PDRB Per Kapita di Pulau Sumatera.

3. Uji t (Pengujian Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil output pada tabel 2, diperoleh:

- a. Pada variabel realisasi anggaran bantuan sosial pangan diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ senilai $4.128719 > 1.66827$ dengan angka prob $0.0001 < 0.05$. Hal ini menjelaskan terdapat hubungan positif dan signifikan antara realisasi anggaran bantuan sosial pangan dengan PDRB Per Kapita di Pulau Sumatera.
- b. Pada variabel indeks demokrasi diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ senilai $-2.129669 > 1.66827$ dengan angka prob $0.0369 < 0.05$. Hal ini menjelaskan terdapat hubungan negatif dan signifikan antara indeks demokrasi dengan PDRB Per Kapita di Pulau Sumatera.
- c. Pada variabel IPM diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ senilai $18.69032 > 1.66827$ dengan angka prob $0.0000 < 0.05$. Hal ini menjelaskan terdapat hubungan positif dan signifikan antara IPM dengan PDRB Per Kapita di Pulau Sumatera.

Pembahasan

A. Pengaruh Realisasi Anggaran Bantuan Sosial Pangan terhadap PDRB Per Kapita

Hasil estimasi model Random Effect menunjukkan bahwa realisasi anggaran bantuan sosial pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, dengan nilai koefisien sebesar 0.027506 dan probabilitas 0.0001. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial pangan secara langsung memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat, penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin, serta menjaga stabilitas pola konsumsi kelompok berpendapatan rendah yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Dampak ini secara umum mencerminkan fungsi stimulus fiskal pemerintah yang efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi berbasis konsumsi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Dwilaksmi et al. (2025) yang menegaskan bahwa belanja bantuan sosial pangan memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan aspek kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penguatan indikator pembangunan manusia, yang kemudian memengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi

regional. Bantuan sosial pangan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai penggerak permintaan agregat, terutama di wilayah yang struktur perekonomiannya bertumpu pada konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan (Nasir et al., 2023). Dengan demikian, efeknya tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga menciptakan multiplier effect terhadap sektor-sektor pendukung lainnya.

Selain itu, efektivitas bantuan sosial pangan juga terlihat melalui perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi kelompok miskin dan rentan yang paling sensitif terhadap kenaikan harga dan perlambatan aktivitas ekonomi (Pramestry et al., 2022). Penyaluran yang tepat sasaran meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga sehingga memperkuat daya tahan ekonomi mikro dan mendorong kenaikan PDRB per kapita. Temuan ini selaras dengan Cahyani et al. (2024) yang menegaskan bahwa belanja pemerintah terkait kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, temuan penelitian ini mempertegas bahwa instrumen fiskal berupa belanja bantuan sosial pangan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan PDRB per kapita. Dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek melalui peningkatan konsumsi, tetapi juga jangka panjang melalui pengurangan kerentanan pangan, peningkatan kualitas hidup, dan perbaikan distribusi pendapatan. Hal ini menjadikan belanja bantuan sosial pangan sebagai salah satu kebijakan kunci dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di wilayah yang masih menghadapi ketimpangan dan kerawanan sosial ekonomi.

B. Pengaruh Indeks Demokrasi terhadap PDRB Per Kapita

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, dengan koefisien sebesar -0.003167 dan nilai probabilitas 0.0369 . Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas demokrasi dan kinerja ekonomi di tingkat regional bersifat kompleks dan tidak dapat dipandang secara linier. Terutama di wilayah Pulau Sumatera, yang memiliki kondisi sosial-politik dan ekonomi yang heterogen, peningkatan kualitas demokrasi tidak serta merta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan kualitas demokrasi dapat menimbulkan gesekan institusional yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi regional.

Temuan negatif ini konsisten dengan sebagian literatur yang menunjukkan bahwa peningkatan demokratisasi tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan efisiensi ekonomi (Purba & Hariyadi, 2023). Dalam sejumlah kasus, perluasan ruang demokrasi memunculkan intensitas aktivitas politik yang meningkat, namun tidak selalu terintegrasi dengan efektivitas mitigasi kebijakan di tingkat daerah. Adib & Triani (2020) turut menegaskan bahwa beberapa komponen demokrasi seperti kebebasan sipil, partisipasi politik, dan pemantauan publik dapat menciptakan dinamika politik yang justru memperlambat kesinambungan program pembangunan, terutama ketika institusi birokrasi belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola perubahan tersebut.

Kondisi ini semakin diperjelas oleh kenyataan bahwa peningkatan skor IDI sering kali diikuti oleh proses pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan kebijakan, sehingga durasi pengambilan keputusan menjadi lebih panjang dan rentan terhadap kontestasi kepentingan (Wibowo, 2022). Meskipun partisipasi publik merupakan ciri demokrasi yang sehat, proses tersebut dapat mengurangi efisiensi implementasi kebijakan, terutama ketika kebutuhan ekonomi menuntut keputusan yang cepat dan terarah. Akibatnya, perlambatan birokrasi ini dapat memengaruhi efektivitas program pembangunan dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDRB per kapita.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Novanto (2024), yang menegaskan bahwa peningkatan indikator demokrasi tanpa dukungan stabilitas politik, reformasi kelembagaan, dan perbaikan tata kelola justru berpotensi menciptakan biaya politik dan administratif yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang tumbuh tanpa diiringi optimalisasi governance dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, hubungan negatif yang muncul dalam penelitian ini kemungkinan mencerminkan situasi di mana peningkatan IDI di wilayah Sumatera belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan efektivitas institusi publik.

Artinya, peningkatan kualitas demokrasi memang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan, namun dampak tersebut baru dapat tercapai apabila disertai dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, kepastian regulasi, serta konsistensi implementasi kebijakan ekonomi. Tanpa dukungan tersebut, demokrasi yang berkembang justru dapat menciptakan proses politik yang panjang dan lamban, sehingga belum mampu menghasilkan kontribusi signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Pengaruh IPM terhadap PDRB Per Kapita

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, dengan koefisien 0.129338 dan probabilitas 0.0000, yang menjadikannya variabel paling dominan dalam model estimasi. Temuan ini menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan hanya memperbaiki aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga secara langsung mendorong produktivitas serta kapasitas ekonomi daerah untuk berkembang. Dapat dikatakan bahwa IPM menjadi instrumen paling strategis bagi percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Temuan ini didukung oleh pandangan Nasir et al. (2023) menegaskan bahwa peningkatan IPM meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup berhubungan erat dengan peningkatan produktivitas serta kapasitas ekonomi regional. Masyarakat yang lebih sehat, terdidik, dan memiliki daya beli lebih baik akan mampu berkontribusi secara optimal terhadap aktivitas ekonomi melalui peningkatan output serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Konsistensi temuan ini juga diperkuat oleh Cahyani et al. (2024, hlm. 17) yang menyatakan bahwa komponen IPM menjadi penentu penting tingkat partisipasi masyarakat dalam perekonomian, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan yang mendorong kualitas tenaga kerja, inovasi, dan daya saing daerah.

Selain itu, hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari efektivitas belanja pemerintah, termasuk belanja sosial dan belanja modal yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas manusia. Pramestry et al. (2022) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kualitas modal manusia, sehingga investasi fiskal di sektor-sektor tersebut menjadi mekanisme penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Belanja negara yang tepat sasaran tidak hanya memperkuat dimensi kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memperbaiki struktur kesempatan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, temuan ini mempertegas bahwa pembangunan manusia merupakan pilar fundamental dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. PDRB per kapita di Pulau Sumatera terbukti sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga arah kebijakan pemerintah perlu terus difokuskan pada penguatan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pengembangan kapasitas ekonomi rumah tangga untuk menciptakan pondasi pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing. Dengan investasi yang konsisten pada kualitas modal manusia, struktur ekonomi daerah diharapkan menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2018–2024 dipengaruhi secara signifikan oleh realisasi anggaran bantuan sosial pangan, kualitas demokrasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berkontribusi secara signifikan dalam menjelaskan variabilitas kinerja ekonomi regional, dengan tingkat keakuratan model mencapai 91,9%. Secara parsial, realisasi anggaran bantuan sosial pangan memberikan pengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan alokasi bantuan pangan dapat memperkuat daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Di sisi lain, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memberikan pengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah belum selalu diikuti oleh efektivitas birokrasi dan stabilitas politik yang cukup, sehingga menimbulkan potensi gesekan institusional yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, IPM menjadi variabel yang paling dominan dan signifikan, menegaskan bahwa

peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Referensi

1. Adib, I., & Triani, M. (2020). *Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (kasus provinsi)*. *Ecosains*, 8(1), 67–76. <https://dx.doi.org/10.24036/ecosains.11519657.00>
2. Amin, C., Zamzam, I., Reviane, I. T. A., Duko, F., Hasnin, M., Muhammad, N. I., Hartarto, R. B., & Anwar, C. J. (2024). Social assistance performance on local economic development: evidence from island regions in East Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 97–109. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20988>
3. Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Upp Stm Ykpm.
4. Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Demokrasi Indonesia (Idi) Menurut Provinsi, 2009-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/34/2159/1/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>.
5. Badan Pusat Statistik. (2025, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (C-to-C)*. Belitung. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 30(2), 133. <https://doi.org/10.20473/mkp.v30i22017.133-149>.
6. Boston, J. (2019). Redesigning The Welfare State. *Policy Quarterly*, 15(1). <https://doi.org/10.26686/Pq.V15i1.5289>.
7. Bps Yogyakarta. (2020). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020*. 115.
8. Cahyani, A. R., Aida, N., & Yuliawan, D. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Makanan Perkapita, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Provinsi Lampung. *Jurnal Ekobistek*, 13(1), 13-19. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i1.770>
9. Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009). Hubungan Antara Dau, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference Ukwms*,
10. Davies, A., & Quinlivan, G. (2006). A Panel Data Analysis Of The Impact Of Trade On Human Development. *Journal Of Socioeconomics*.
11. Dwilaksmi, A., Nabilah, A. A., & Sihalohe, E. D. (2025). Dampak Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 5(1), 36-50. <https://doi.org/10.23969/jrie.v5i1.147>
12. Endang, E., Astuti, H., & Udyana, T. T. (2024). Analisis Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Panel Data 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(2), 155-165. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i2.21825>
13. Fidmuc, J. (2021). Democracy As A Driver Of Post-Communist Economic Development. In *The Palgrave Handbook Of Comparative Economics* (Pp. 517–543). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50888-3_20.
14. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Vol. 2)*. Salemba Empat.
15. Ibrahim, I. (2017). Menakar Kedalaman Pengukuran Demokrasi Model Indeks Demokrasi Indonesia (Idi): Beberapa Catatan Substantif Dari Kepulauan Bangka
16. Iwan Hermawan, S. P., Izzaty Izzaty ST, M. E., Eka Budiyaniti, S. S., Rafika Sari, S. E., Yuni Sudarwati, S., & Mohammad Teja, S. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131-145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2237>
17. Logaritma, S. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2015-2019. In *Bps* (Pp.Xviii–146).
18. Mryn, M., & Imahda Khoiri Furqon. (2024). Pengaruh Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Perwira Journal of Economics & Business*, 4(2), 222–229. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i2.359>
19. Mukaromah, L., Hanifatuzzahra, Z., Nasrullah, A., Latifah, T. M., Purwaningsih, V. T., & Suparta, I. W. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022. *Analisis*, 13(2), 228-245. <https://doi.org/10.37478/Als.V13i2.2874>

20. Nasir, Yuslinaini, A. Hamid, Yusuf, Z., & Zakaria. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 7(3), 676-683. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1199>
21. Novanto, F. S. P., & Prabowo, P. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Demokrasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 4(1), 41-53. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i1.58941>
22. Pramestry, D. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jombang. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(1), 14-21. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v7i2>
23. Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 165-188. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188>
24. Rahmansyah Nasution, A., & Satria, L. P. (2025). The Effectiveness of Social Assistance Programs in Reducing Poverty in Bandar Khalifah Village. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2909-2920. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3376>
25. Ramirez, A., Ranis, G., & Stewart, F. (1988). Economic Growth And Human Capital. Qeh Working Paper No. 18.
26. Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal*, 2 (2), 96-110.
27. Saragih, E. J. C., & Azansyah. (2024). Analysis of the Effect of Government Spending and Human Development Index on Economic Growth in Indonesia 2021 – 2022. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(7), 2769-2780. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i7.10216>
28. Sukmaraga, P. & Hayati, B. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah. [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/26773/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/26773/).
29. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development Economic(Thirteenth). Pearson Education Limited.
30. Wibowo, M. G. (2020). Pengaruh Aspek-Aspek Demokrasi Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2 Desember), 119-130. <https://doi.org/10.14421/jmes.2023.022-08>
31. Wiratman, B. (1987). Kemiskinan Dan Pembebasan. Kanisius.